



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



Penyusunan Program Tahunan berbasis Sumber Dana Internasional, Nasional, dan Daerah

Muhamad Faozi Kurniawan
Departemen HPM
FK-KMK UGM

Mei 2025

ugm.ac.id

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Isi paparan

1. Pengantar
2. Sumber – Sumber Dana Kesehatan



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pengantar

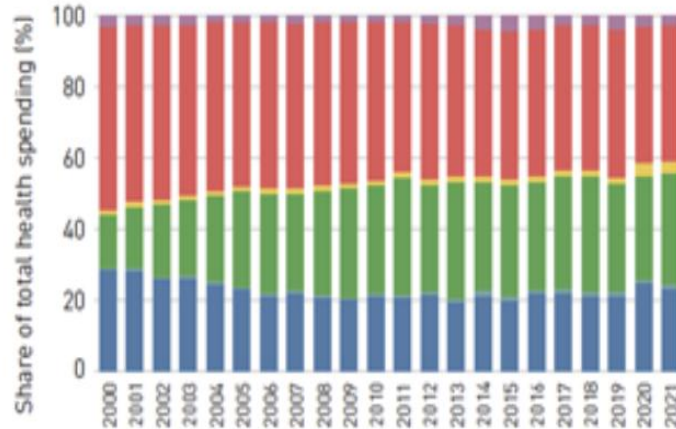
Global Health Expenditure



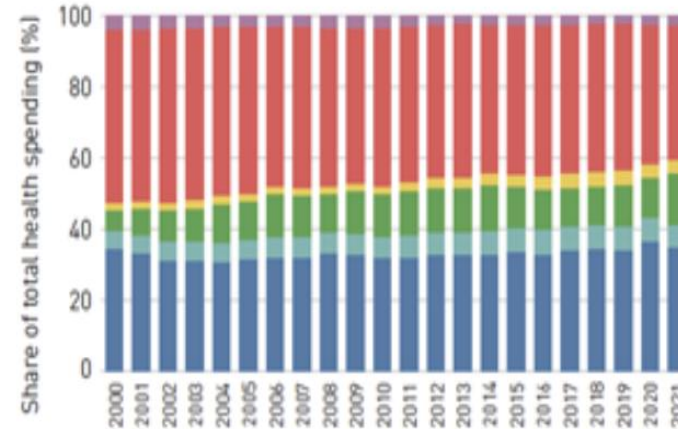
UNIVERSITAS GADJAH MADA

■ Government transfers ■ Social health insurance contributions ■ External aid ■ Voluntary prepayments ■ Out-of-pocket spending ■ Other

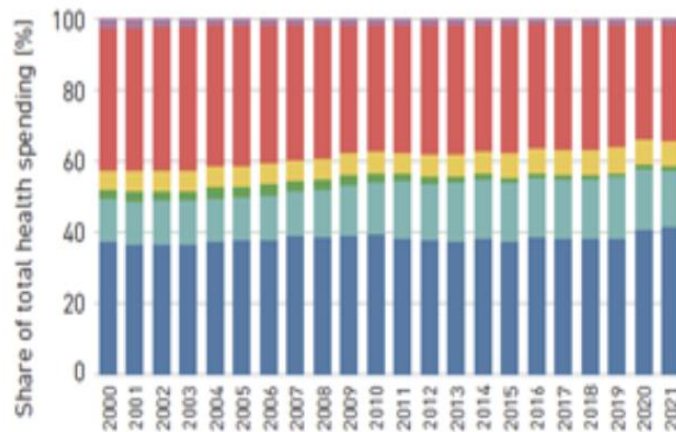
Low income



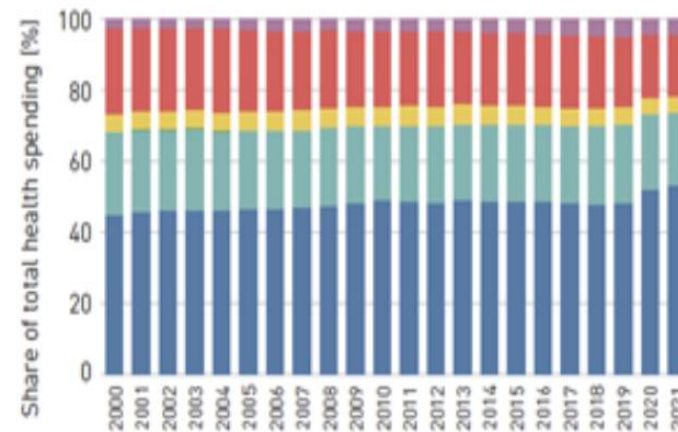
Lower-middle income



Upper-middle income



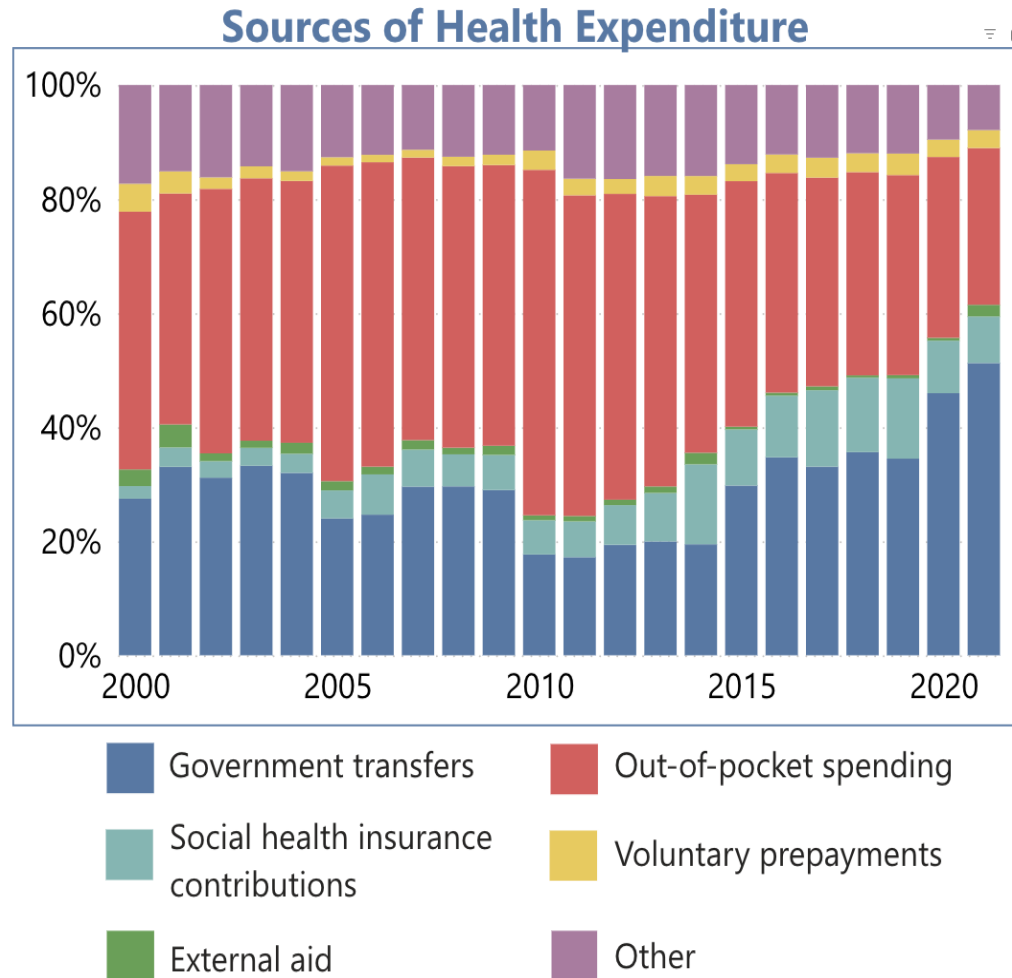
High income



Program di susun berdasarkan sumber dana atau sesuai kebutuhan?

Sumber: WHO, 2024; <https://apps.who.int/nha/database>

Indonesia Source of Health Expenditure



	2005	2010	2015	2021
Health spending US\$ per capita (CHE)	34	86	97	161
Government health spending % Health spending (GGHE-D%CHE)	28.9%	23.7%	39.6%	59.4%
Out-of-pocket spending % Health spending (OOPS%CHE)	55.3%	60.6%	43.0%	27.5%
Priority to health (GGHE-D%GGE)	4.2%	3.9%	6.6%	12.1%
GDP US\$ per capita	1,359	3,094	3,323	4,334

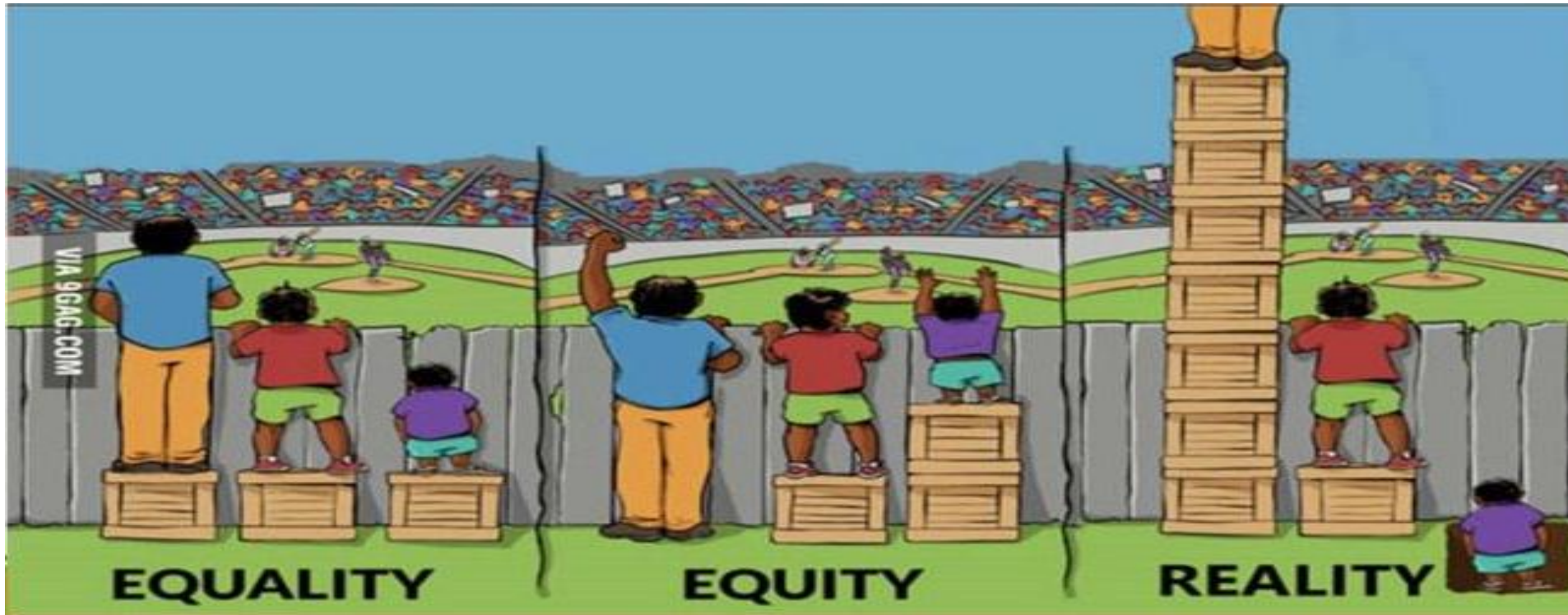
- Pendanaan Kesehatan meningkat setiap tahun
- OOP menurun
- Peningkatan pendanaan program prioritas

Sumber: WHO, 2024; https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en

- UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)
- PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN
- UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS
- UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Permendagri No. 90 Tahun 2019
- Peraturan dan regulasi lainnya...

Akses: www.manajemen-pembiayaankesehatan.net

Siapa sasaran program

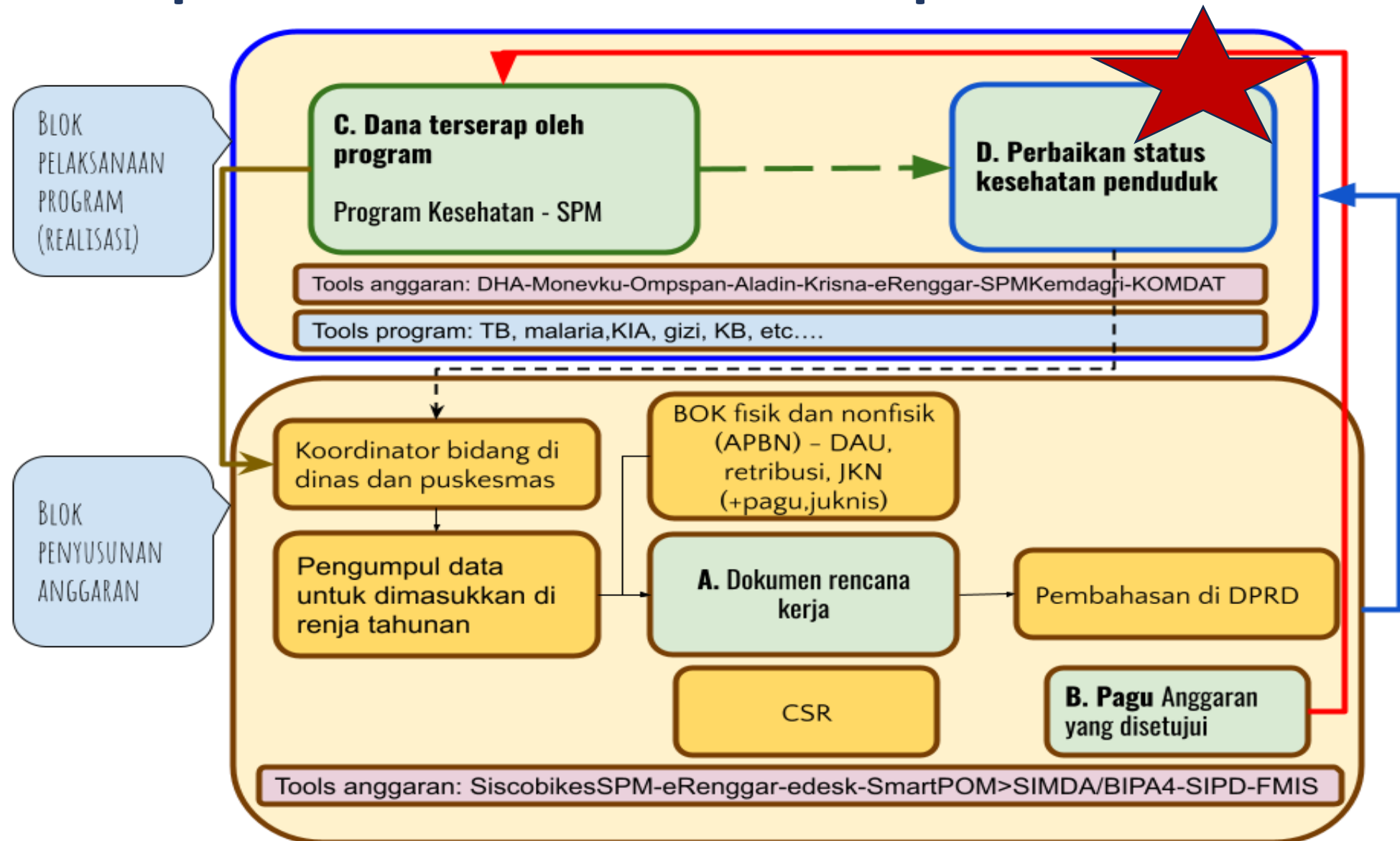


- Siapa sasaran kita?
- Apa yang diberikan kepada sasaran (barang/ jasa) program yang dibuat?

Sejauh mana perencanaan bisa berdampak



UNIVERSITAS GADJAH MADA



Sumber: Hasanbasri, 2020

Tailor made

Membuat baju sesuai ukuran dari orang yang memakainya.

Tailor made

Memberikan layanan yang **accessible** sesuai dengan kelompok penduduk dan daerah geografi

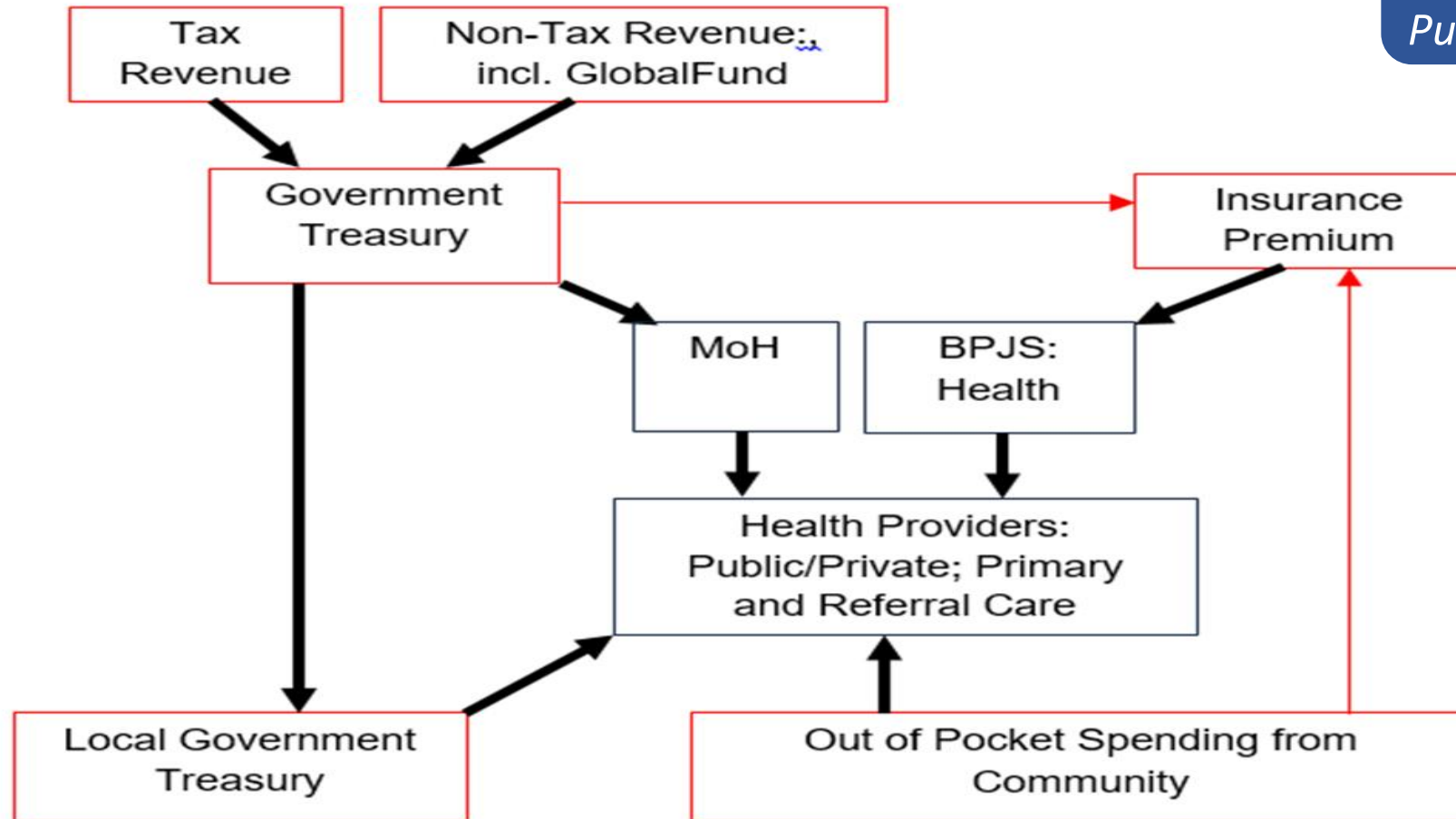
Sumber dana kesehatan

Kerangka Konsep Pendanaan Kesehatan-Dalam Negeri



UNIVERSITAS GADJAH MADA

*Revenue Collection,
Pooling dan
Purchasing*



- **Dana Pemerintah Pusat**

- Dana Kementerian (Dana Program Kemenkes)
- Dana Dekonsentrasi (Ke Propinsi) dan Tugas Pembantuan (Ke Kab/Kota)
- Bantuan Operasional Kesehatan
- PBI APBN
- JAMPERSAL

- **Dana Pemerintah Propinsi**

- Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi)
- Bantuan Gubernur

- **Dana Pemerintah Kabupaten Kota**

- Dana APBD Kabupaten/Kota (PAD)
- Dana Perimbangan/ Dana Transfer (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil – Cukai Tembakau)



Fungsi Alokasi Kesehatan dari Pemerintah

- **Dana Pemerintah Pusat**

- Dana Kementrian → (Dana Program Nasional Kemenkes)
- Bantuan Operasional Kesehatan → (Dana program untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas)
- JAMPERSAL → (Pendanaan Pelayanan Kesehatan di Faskes)
- JKN → (Pendanaan Pelayanan Kesehatan di Faskes)

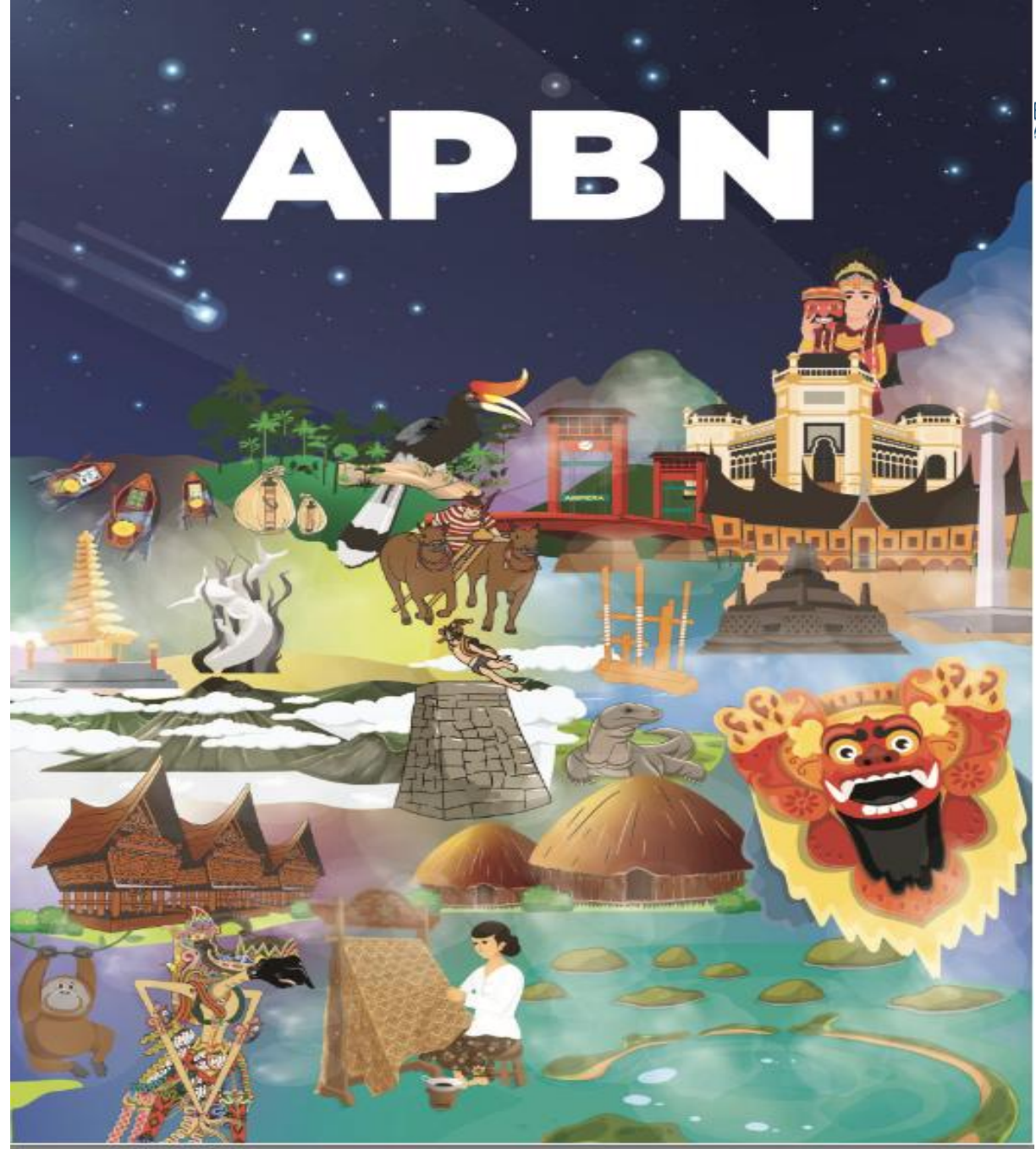
- **Dana Pemerintah Propinsi**

- Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi) → Pendanaan Kegiatan Rutin dan Operasional
- Bantuan Gubernur dan JAMKESDA Prop → Pelayanan Kesehatan Masyarakat diluar Jamkesmas dan Jampersal

- **Dana Pemerintah Kabupaten Kota**

- Dana APBD Kabupaten/Kota (PAD) → Pendanaan Kegiatan Rutin dan Operasional
- Dana Perimbangan
 - DAU → Operasional Kesehatan
 - DAK → Fisik dan Infrastruktur
 - DAK Non Fisik → BOK, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi RSUD, Jampersal
 - Dana Bagi Hasil → Operasional Khusus dan Bencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



**Rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat**

TUJUAN

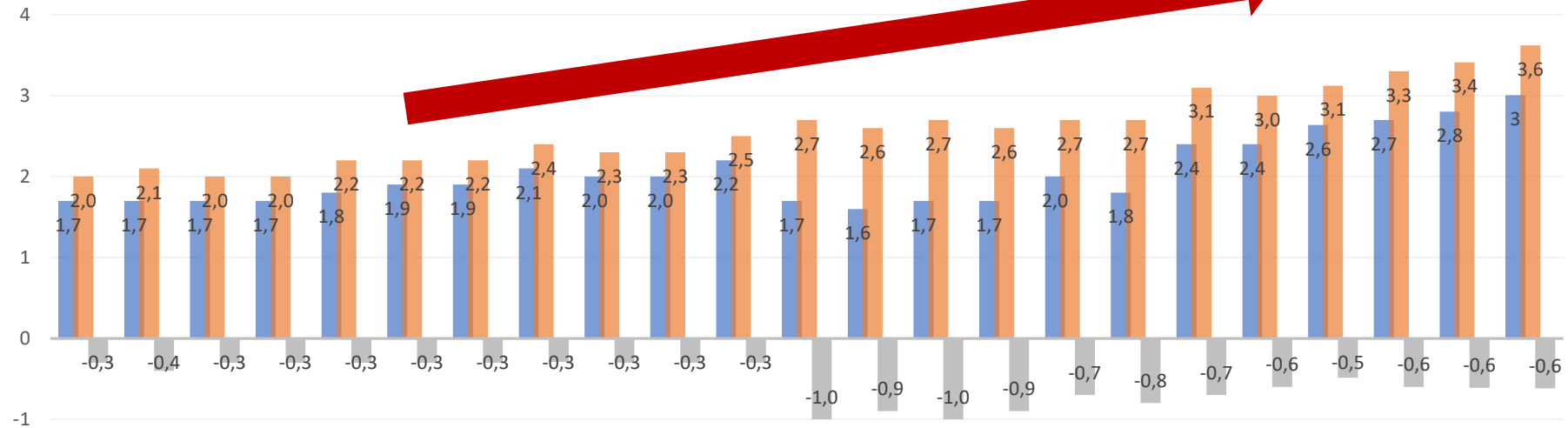
**Pedoman penerimaan & pengeluaran negara dalam
melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan
produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat**



Perkembangan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017-2025

RIBU TRILIUN (KUADRILIUN) RUPIAH



-2

	APBN	APBN-P	Outlook	LKPP	APBN	Outlook	LKPP	APBN	Outlook	LKPP	APBN	Outlook	LKPP	APBN	Outlook	LKPP	APBN	Outlook	APBN	Outlook	APBN	Outlook	APBN
	2017				2018			2019			2020			2021			2022		2023		2024		2025
Pendapatan Negara	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2,1	2,0	2,0	2,2	1,7	1,6	1,7	1,7	2,0	1,8	2,4	2,4	2,6	2,7	2,8	3
Belanja Negara	2,0	2,1	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,5	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,7	3,1	3,0	3,1	3,3	3,4	3,6
Surplus/ Defisit	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-1,0	-0,9	-1,0	-0,9	-0,7	-0,8	-0,7	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6

■ Pendapatan Negara ■ Belanja Negara ■ Surplus/ Defisit



PENDAPATAN APBN 2024

Pendapatan Negara

Rp3.005,1 T

Mencapai 12,36% dari PDB terutama didukung langkah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi

- **Perpajakan** **Rp2.490,9 T**
- **PNBP** **Rp513,6 T**
- **Hibah** **Rp0,6 T**

Uraian	2024		2025
	APBN	Outlook	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	2.802,3	2.802,5	3.005,1
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.801,9	2.767,5	3.004,5
1. Penerimaan Perpajakan	2.309,9	2.218,4	2.490,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	492,0	549,1	513,6
II. PENERIMAAN HIBAH	0,4	34,9	0,6
B. BELANJA NEGARA	3.325,1	3.412,2	3.621,3
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	2.467,5	2.558,2	2.701,4
1. Belanja K/L	1.090,8	1.198,8	1.160,1
2. Belanja non-K/L	1.376,7	1.359,4	1.541,4
II. TRANSFER KE DAERAH	857,6	854,0	919,9
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(25,5)	(110,8)	(63,3)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(522,8)	(609,7)	(616,2)
<i>% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,29)</i>	<i>(2,70)</i>	<i>(2,53)</i>
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	522,8	609,7	616,2

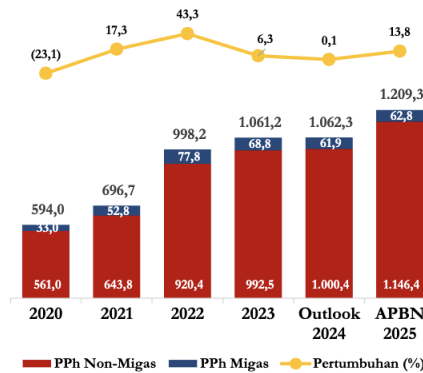
Sumber: Kementerian Keuangan

Pajak, Cukai



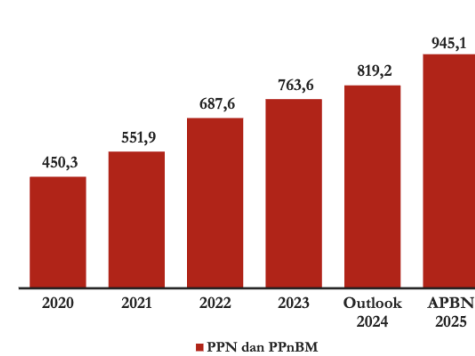
UNIVERSITAS GADJAH MADA

PAJAK PENGHASILAN, 2020–2025
(triliun rupiah)



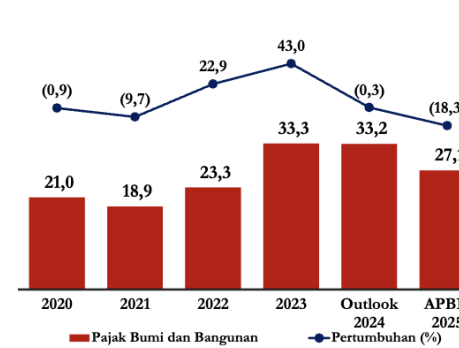
Sumber: Kementerian Keuangan

PPN DAN PPnBM, 2020–2025
(triliun rupiah)



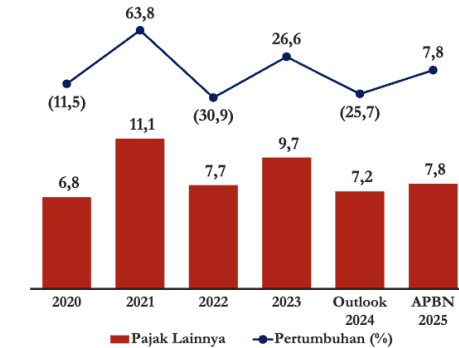
Sumber: Kementerian Keuangan

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 2020–2025
(triliun rupiah)



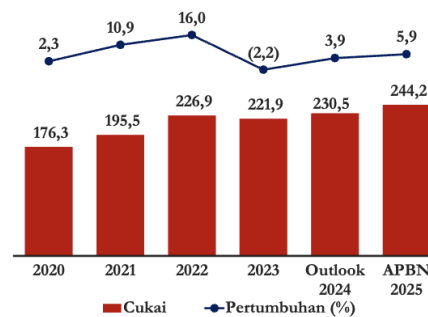
Sumber: Kementerian Keuangan

PAJAK LAINNYA, 2020–2025
(triliun rupiah)



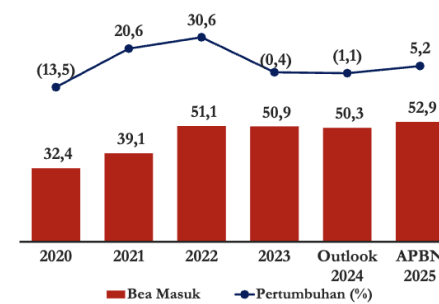
Sumber: Kementerian Keuangan

CUKAI, 2020–2025
(triliun rupiah)



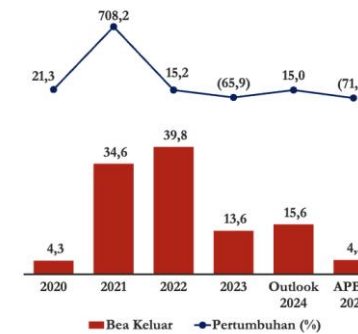
Sumber: Kementerian Keuangan

BEA MASUK, 2020–2025
(triliun rupiah)



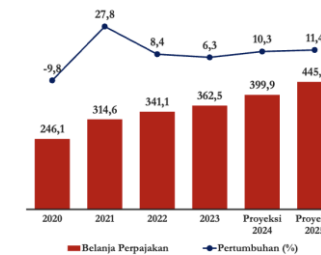
Sumber: Kementerian Keuangan

BEA KELUAR, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

BELANJA PERPAJAKAN, 2020–2025
(triliun rupiah)

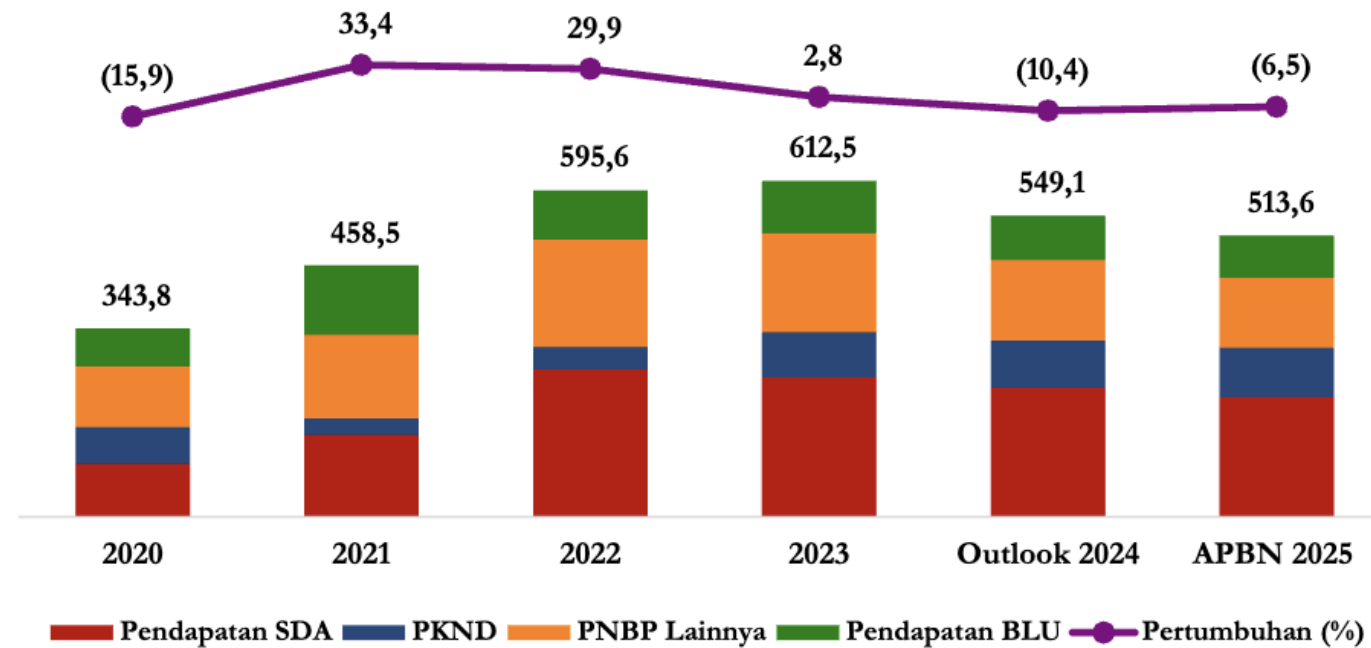


Sumber: Kementerian Keuangan

- Kontribusi PPH berkisar 57% dari total Pendapatan Pajak

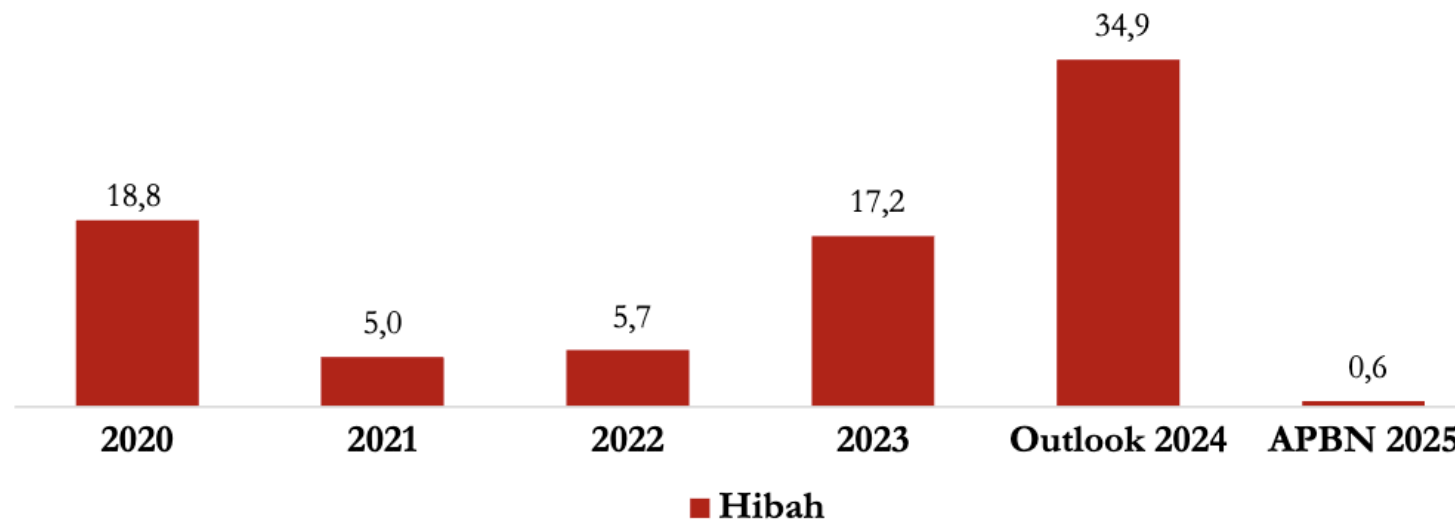
Pendapatan Negara Bukan Pajak

PERKEMBANGAN PNBP, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

PENERIMAAN HIBAH, 2020–2025 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Belanja Negara

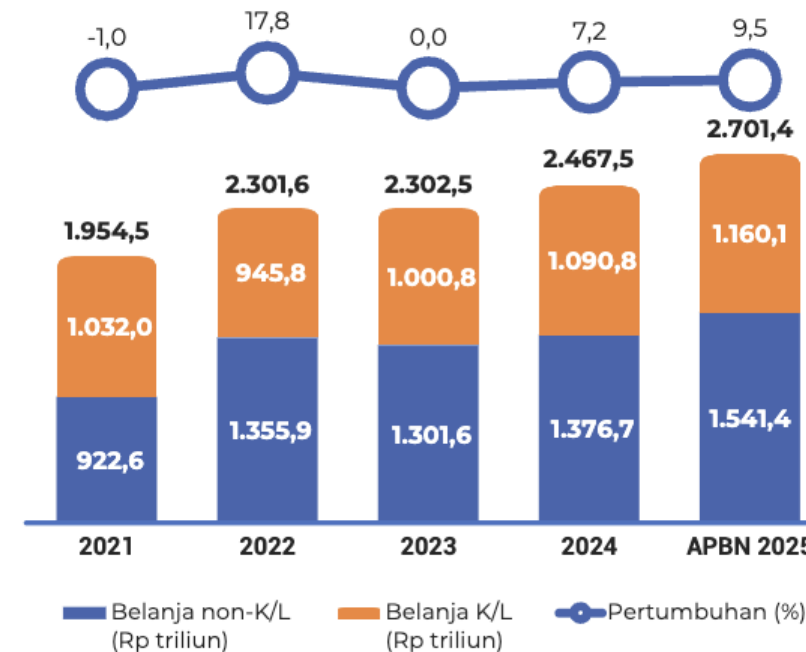
Rp3.621,3 T

Dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional

- **Belanja Pemerintah Pusat** **Rp2.701,4 T**
- **Transfer Ke Daerah** **Rp919,9 T**

Belanja Pemerintah Pusat

Kualitas belanja ditingkatkan melalui efisiensi dan efektivitas untuk akselerasi transformasi ekonomi



Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi

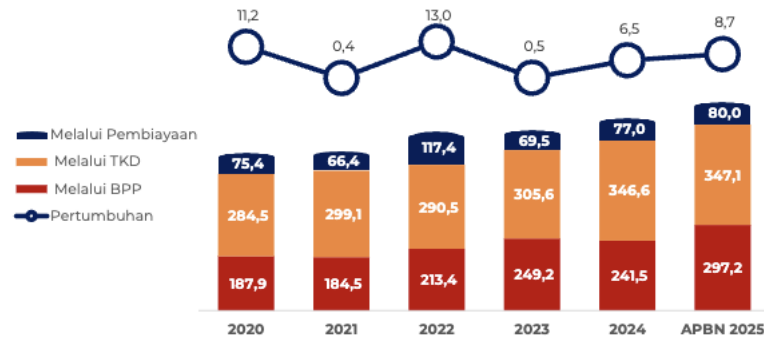


10 Kementerian/ Lembaga dengan Pagu Terbesar pada APBN 2025



Anggaran Pendidikan Rp724,3 T

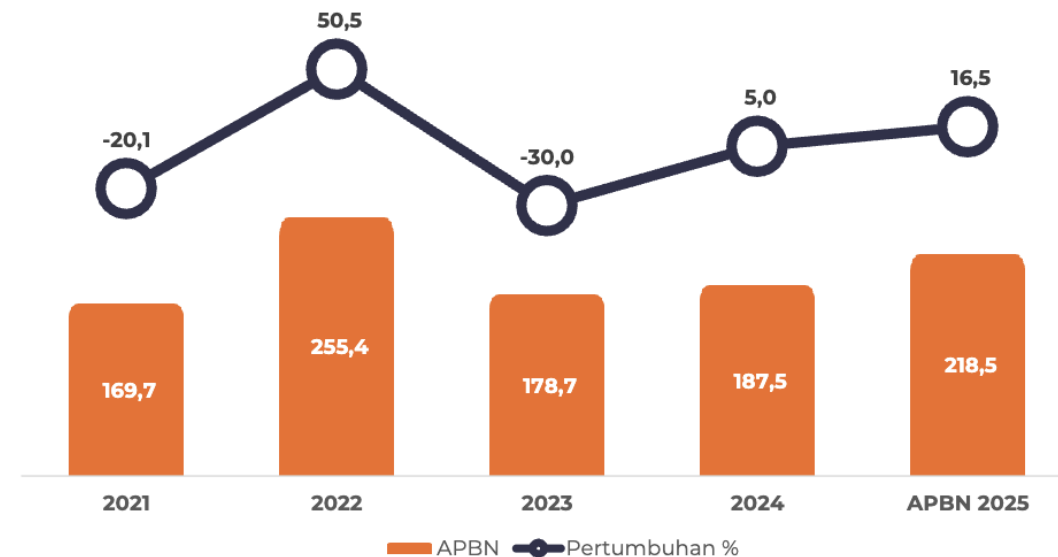
Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Anggaran Kesehatan

Rp218,5 T

Mewujudkan SDM sehat dan produktif, serta mendukung transformasi sistem kesehatan



Target Output Prioritas



- Cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa
- Penyediaan makanan tambahan bagi 23.150 ibu hamil dan 140.374 balita (*buffer stock*)
- Bantuan pendidikan PPDS/PPDGS untuk 2.990 orang
- Penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 2.289 orang
- Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 8,1 juta keluarga
- Sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.802 sampel
- Penguatan 61 Puskesmas Rehabilitasi 537 balai penyuluhan KB
- Pengadaan 21 unit laparoscopi dengan kamera dan monitor
- Penyediaan bantuan operasional kesehatan yang ditujukan untuk 10.165 puskesmas
- Program Bangga Kencana di 6.231 balai penyuluhan KB

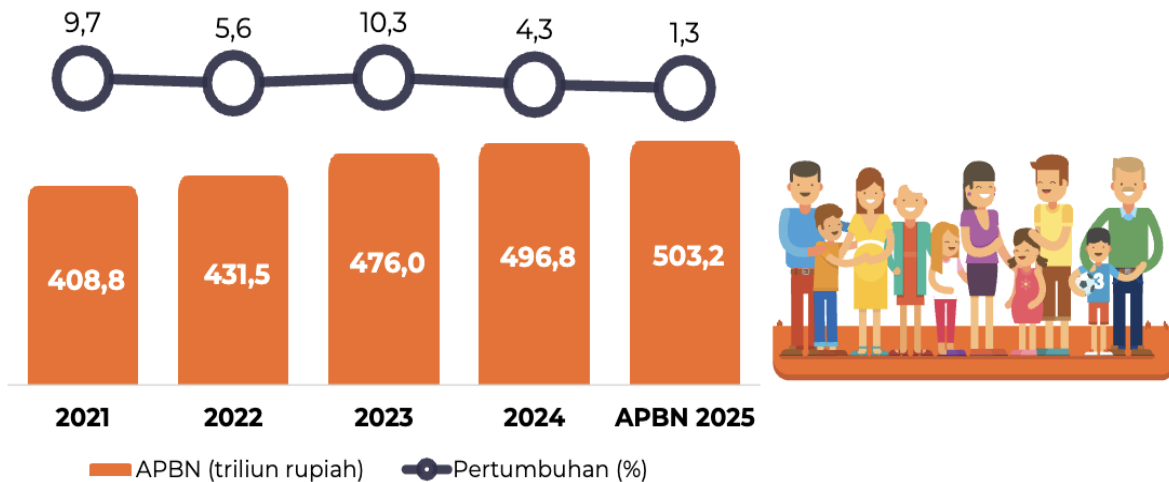
sif dan Berkelanjutan

- Penguatan infrastruktur
- Penguatan SDM Kesehatan
- Apakah sudah teralokasi dengan adil?

Anggaran Perlinsos

Rp503,2 T

Pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan



- Mempercepat Penurunan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan, dan Pembangunan SDM Jangka Panjang

Target Prioritas



UNIVERSITAS GADJAH MADA

 Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10,0 juta KPM	 Penyaluran Subsidi Jenis BBM Tertentu sebanyak 19,41 juta kiloliter
 Program Bansos Sembako untuk 18,3 juta KPM	 Penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 kg sebanyak 8.170 juta kg
 Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi 41,8 ribu anak, 37,4 ribu Lansia, serta 64,1 ribu penyandang disabilitas	 Penyaluran Subsidi Bunga KUR untuk 7,05 juta debitur
 Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana melalui BNPB	 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 2,96 juta KPM

keterangan: Program Perlisos termasuk penyaluran bansos melalui PIP, KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI JKN

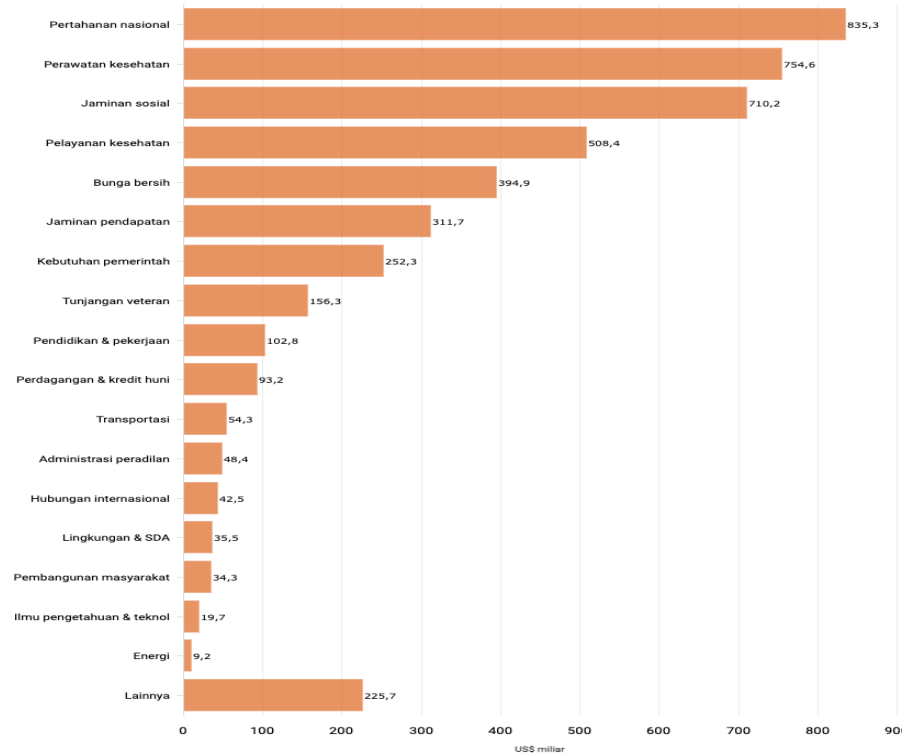
- Integrasi data penerima manfaat program – sinkronisasi data dengan Kesehatan dan BPJS Kesehatan

APBN Indonesia-USA

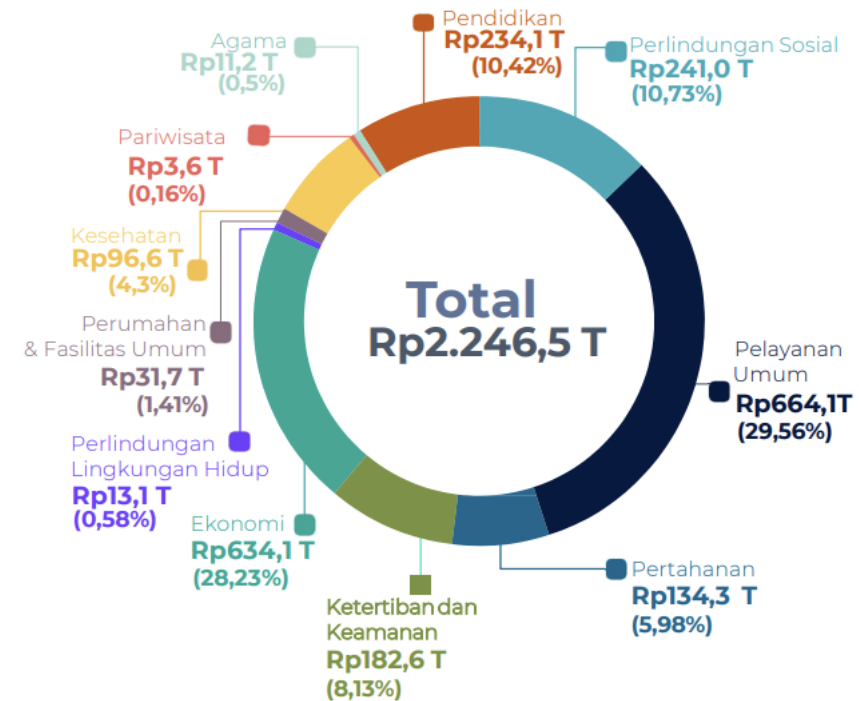


UNIVERSITAS GADJAH MADA

APBN Amerika-2023



APBN Indonesia-2023

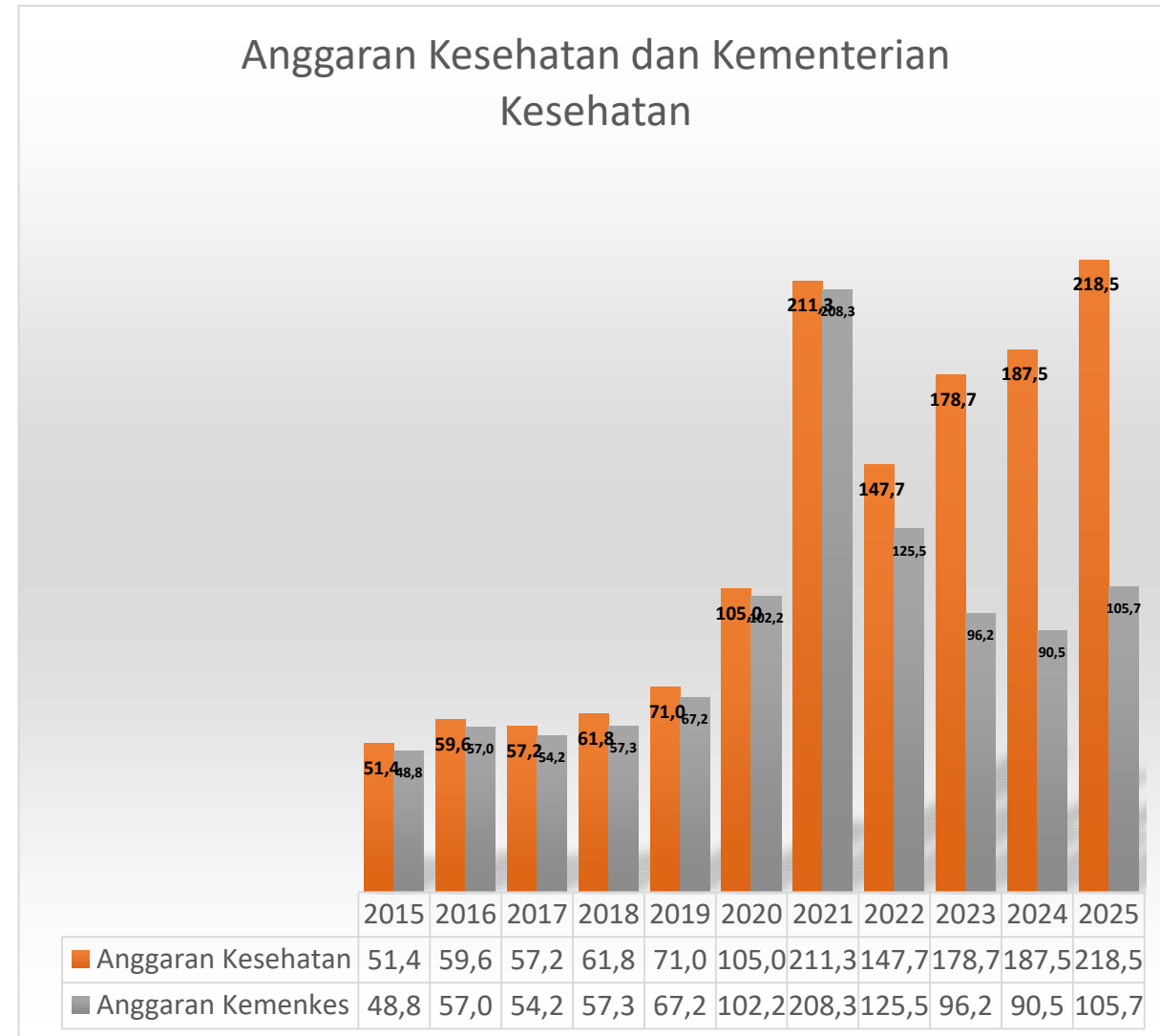


- USA – besar di pertahanan – kesehatan no 2
- INA – besar di perlindungan pelayanan umum – kesehatan no. 6

APBN 2015 -2025



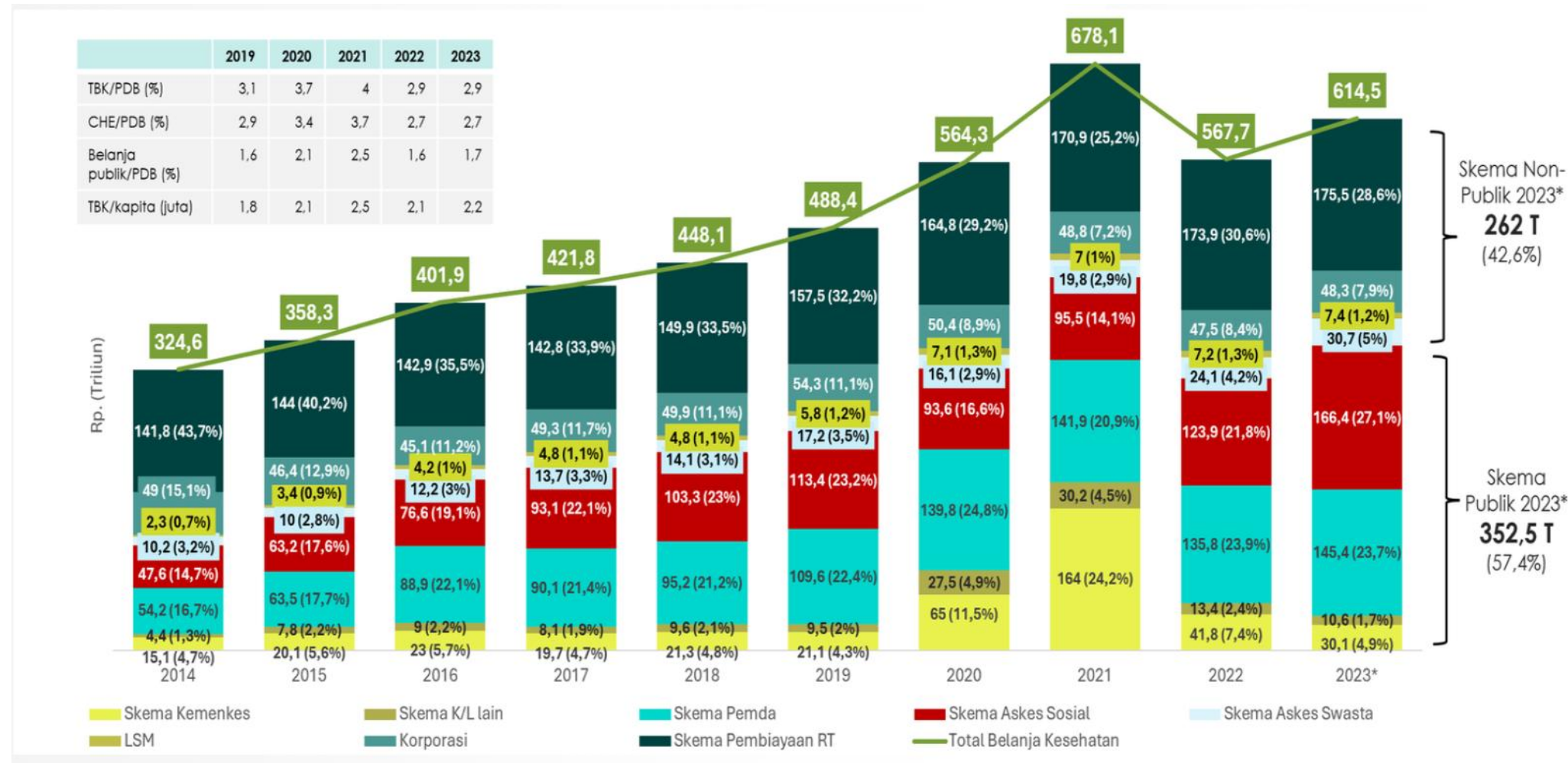
- Naik pada saat pandemic
- Ada kebijakan “tiba-tiba” karena wabah
- Apakah anggaran ini baik atau buruk??? Atau perlu pengembangan lebih lanjut?



Belanja Kesehatan Indonesia 2014-2023

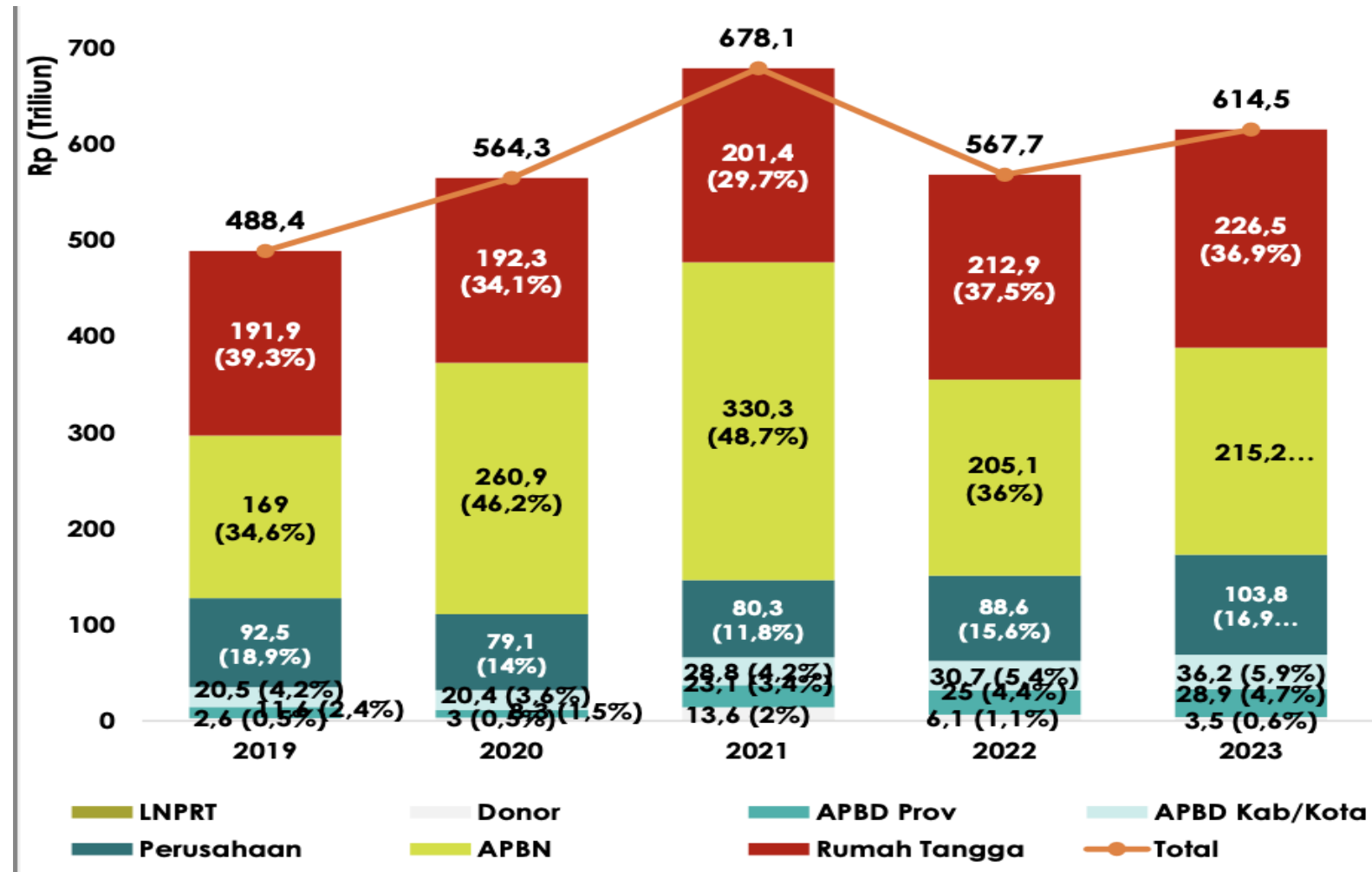


UNIVERSITAS GADJAH MADA



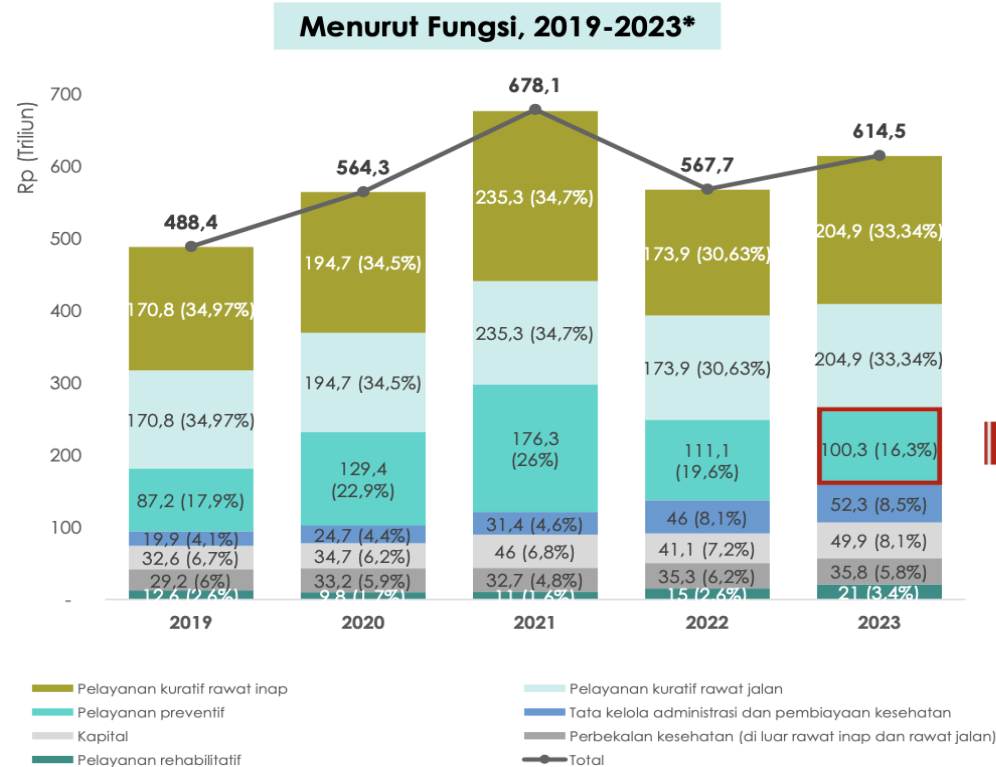
Sumber: Kemkes, 2024

Sumber Pendanaan, 2019-2023



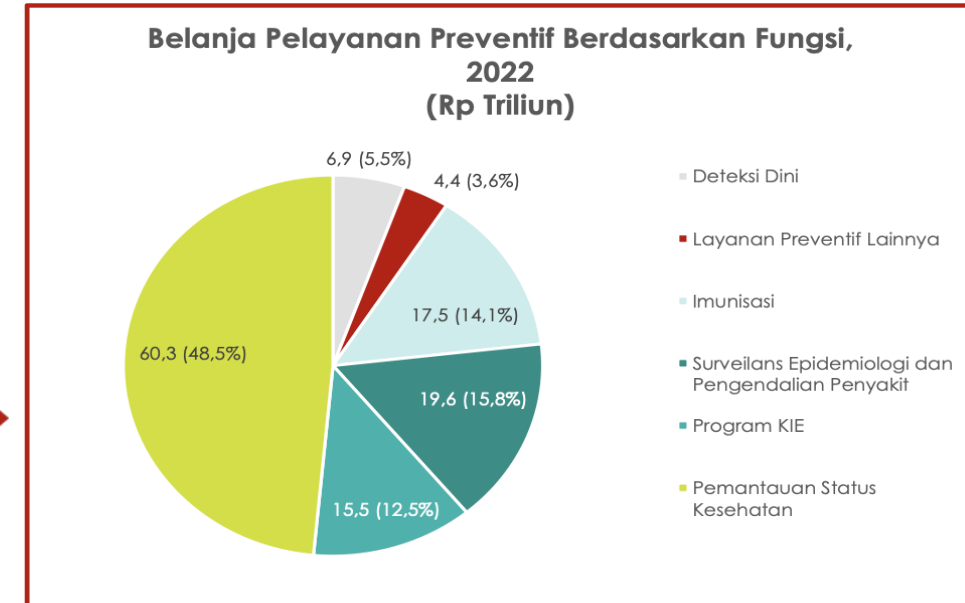
Sumber: Kemenkes, 2024

Belanja Kesehatan Fungsi



Sumber: National Health Accounts, 2023*

*angka estimasi asuransi swasta dan korporasi belum published



Pemantauan status Kesehatan: ibu hamil, ibu bersalin, balita, gizi Masyarakat, KB, usia produktif, usia Pendidikan dasar, usia lanjut

Layanan preventif lainnya: kunjungan sehat pada skema Askes Sosial berupa kunjungan online (konsultasi via *mobile* JKN dan WA) dan langsung (konseling, kunjungan rumah dan senam)

Kuatnya peran pemerintah serta Rumah Tangga turut berperan besar dalam masa pandemi

Pembiayaan Kesehatan lebih banyak dibelanjakan di RS

Di tahun 2021, Layanan preventif meningkat tajam terkait dengan upaya Kesehatan di masa Pandemi Covid-19

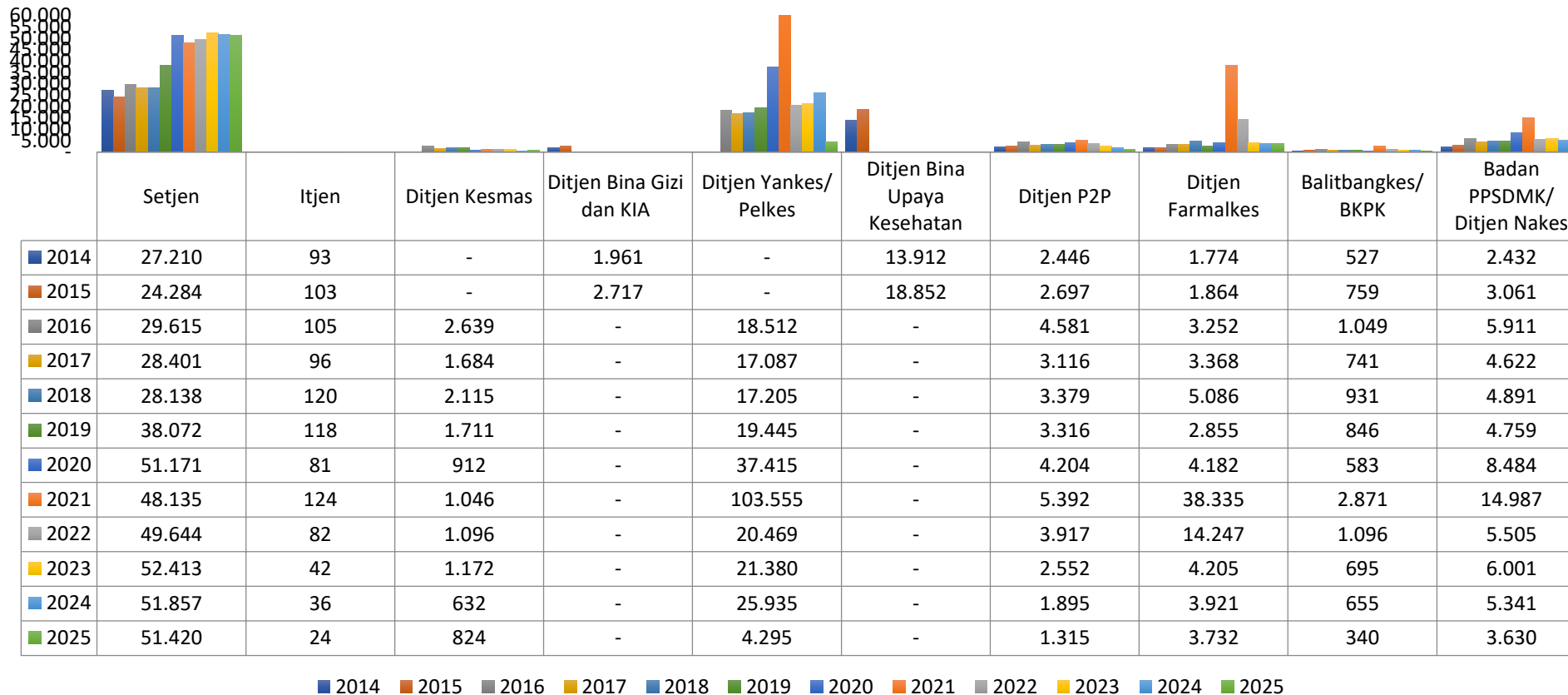
Sumber: Kemenkes, 2024

Dana Unit-Unit di Kementerian Kesehatan



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Anggaran Kemenkes Unit Organisasi 2015-2025 (milyar rupiah)



2025

- 74,7 % untuk JKN – Rp. 48,9 Triliun
- Kesmas dan Pencegahan Penyakit = 1,4% - Rp. 948 Miliar

Dana Program di Kementerian Kesehatan



Anggaran Kementerian Kesehatan Per Program
(Miliar Rupiah)



- Anggaran Tinggi - JKN
- Anggaran Rendah - Riset Kebijakan
- Infrastruktur???
- Alat kesehatan??
- SDM Kesehatan??

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



SKEMA PENDANAAN DAERAH



UNIVERSITAS GADJAH MADA

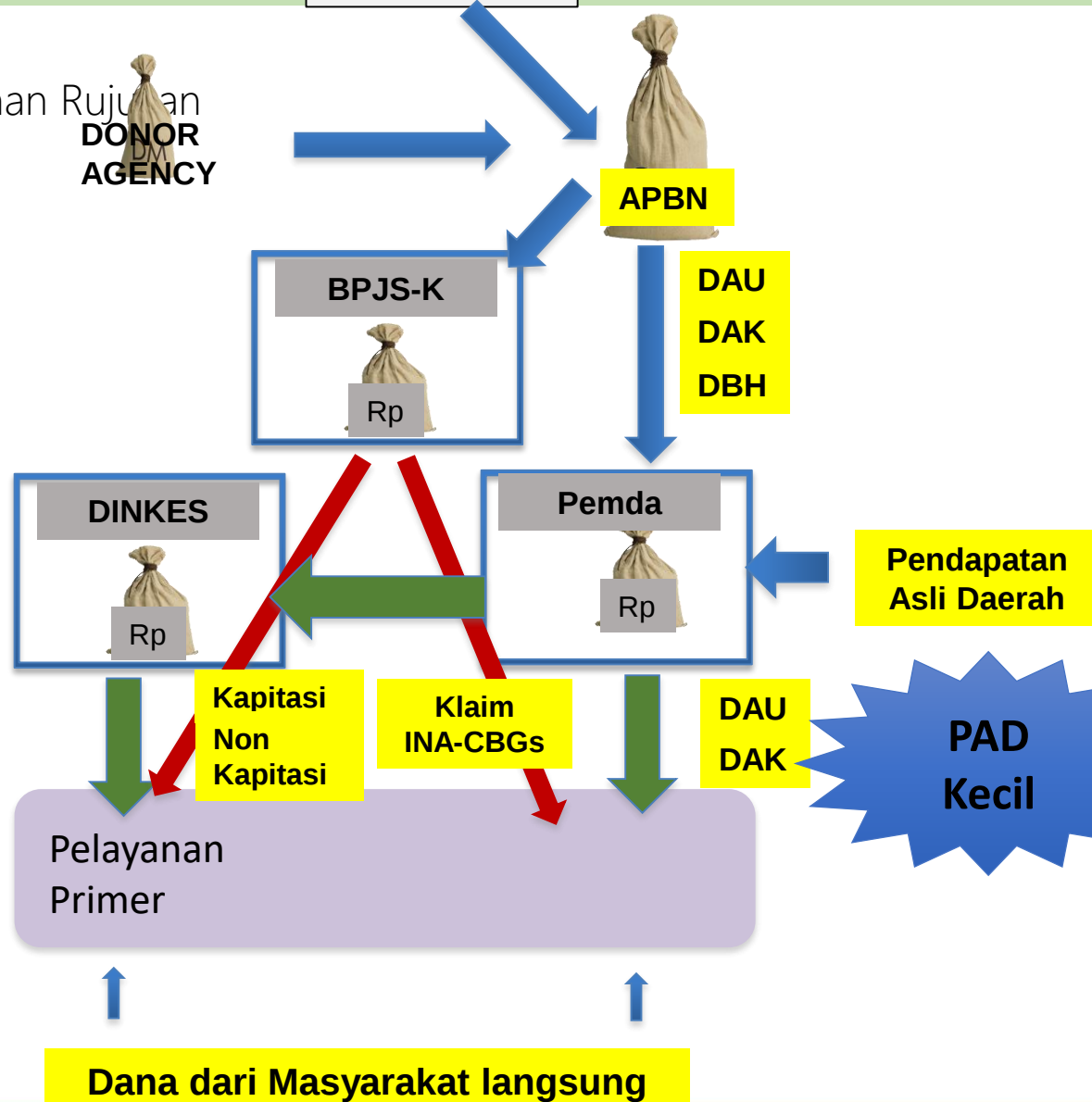
Pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah (seluruh urusan)	Mendanai kebutuhan belanja operasional	Mendanai kebutuhan khusus daerah (dukungan belanja modal)	Dana Desa	Reward	Pengaturan Khusus	Mendanai kebutuhan non-regular
DAU <i>Equalization grant (block grant)</i> berbasis formula <i>fiscal gap + Alokasi Dasar (berbasis Gaji PNSD)</i> DAU 2019 bersifat final (meningkatkan kepastian pendanaan APBD)	DAK Non Fisik Dukungan pendanaan khusus untuk belanja operasional berbasis unit cost 1. BOS 2. BOP PAUD 3. BOP Pendidikan Kesenjangan 4. Tunjangan Profesi Guru PNSD 5. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 6. Tunjangan Khusus Guru PNSD 7. BOK & BOKB 8. dll.	DAK Fisik Reguler Dukungan pemenuhan pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ketersediaan sarana dan prasarana DAK Fisik Penugasan Dukungan pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu DAK Fisik Afirmasi Dukungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi	Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat	Dana Insentif Daerah Insentif kepada daerah tertentu yang mempunyai kinerja baik Kriteria Utama: 1. Opini BPK atas LKPD 2. Penetapan Perda APBD yang tepat waktu 3. Penggunaan e-government 4. Ketersediaan Pelayanan Satu Pintu	Dana Otsus & Dana Keistimewaan DIY Dukungan pendanaan khusus untuk daerah tertentu yg diatur dg UU khusus Dana Otsus 1. <u>Papua</u>: UU No. 21 Tahun 2001 2. <u>Papua Barat</u>: UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008 3. <u>Aceh</u>: UU No. 11 Tahun 2006 Dana Keistimewaan DIY – UU No. 13 Tahun 2012	Hibah Dukungan pendanaan khusus untuk daerah yang bersifat temporer dan dilakukan dengan perikatan perjanjian Pinjaman Percepatan pembangunan daerah khususnya bagi daerah-daerah dengan kapasitas fiskal tinggi
DBH Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip <i>by origin</i> .						

Pajak dan
Bukan Pajak

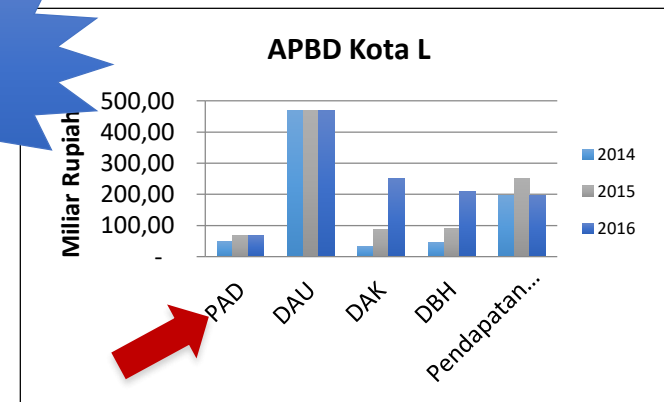
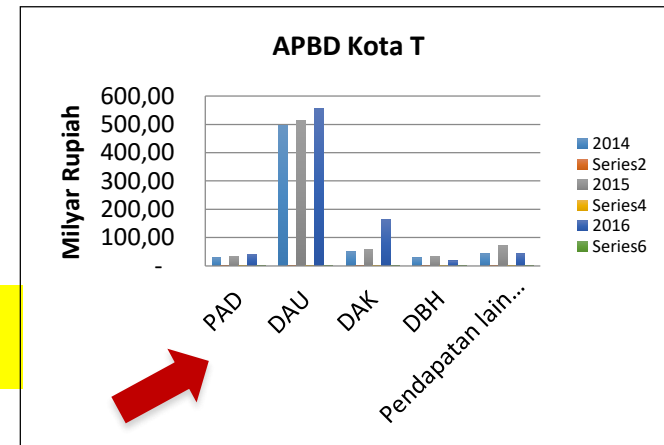
Dana Kesehatan - APBD

A

Pelayanan Rujukan
DONOR
AGENCY



PAD < Dana Transfer
(DAU, DAK, DBH)

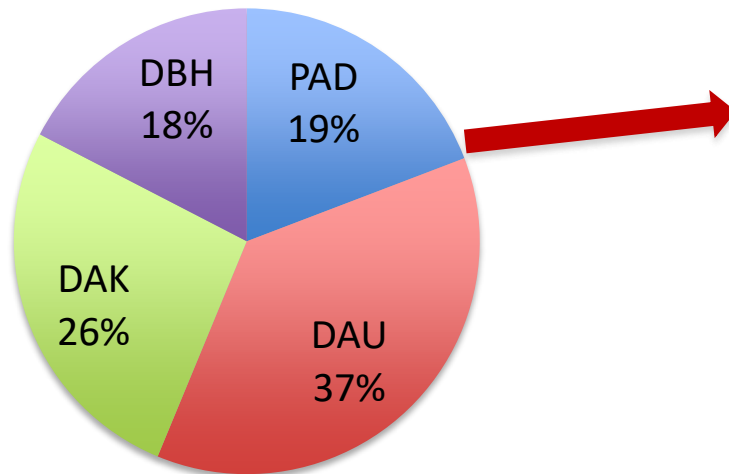


Anggaran Program Kesehatan Dinas Kesehatan



UNIVERSITAS GADJAH MADA

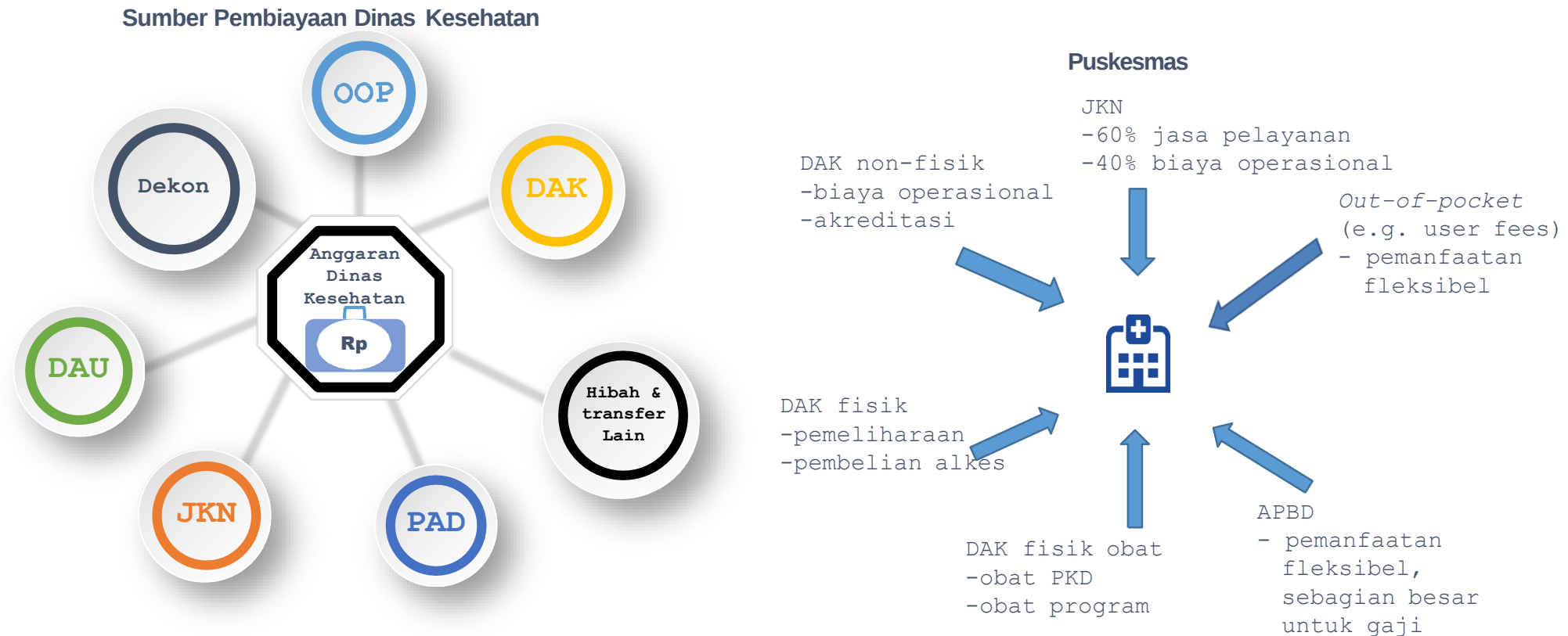
Dinas Kesehatan



Belanja	Alokasi (Rp. Miliar)	%
Total Belanja Gaji	17,631	38%
Total Belanja Administrasi	4,624	10%
Total Belanja Peningkatan SDM Kesehatan	780	2%
Total Belanja Modal/Investasi	7,011	15%
Total Belanja UKP	9,477	21%
Total Belanja UKM	6,700	14%
Total Anggaran Dinas Kesehatan	46,226	100%

- Prosentase belanja gaji 38% dari total anggaran dinas kesehatan, meskipun belum ada aturan standar besaran tersebut sudah di bawah 50% belanja program dan kegiatan
- Besaran belanja **UKM 14%** di bawah belanja **UKP 21%**
- **Belanja UKP termasuk belanja Jamkesda**

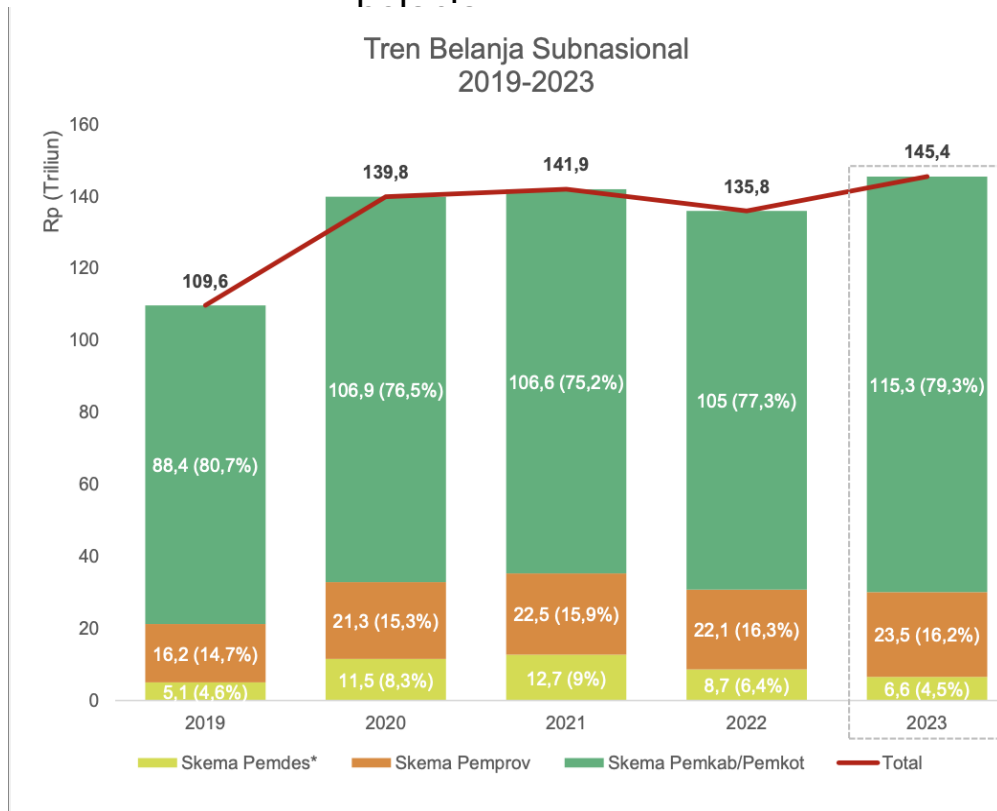
Berbagai sumber pembiayaan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas



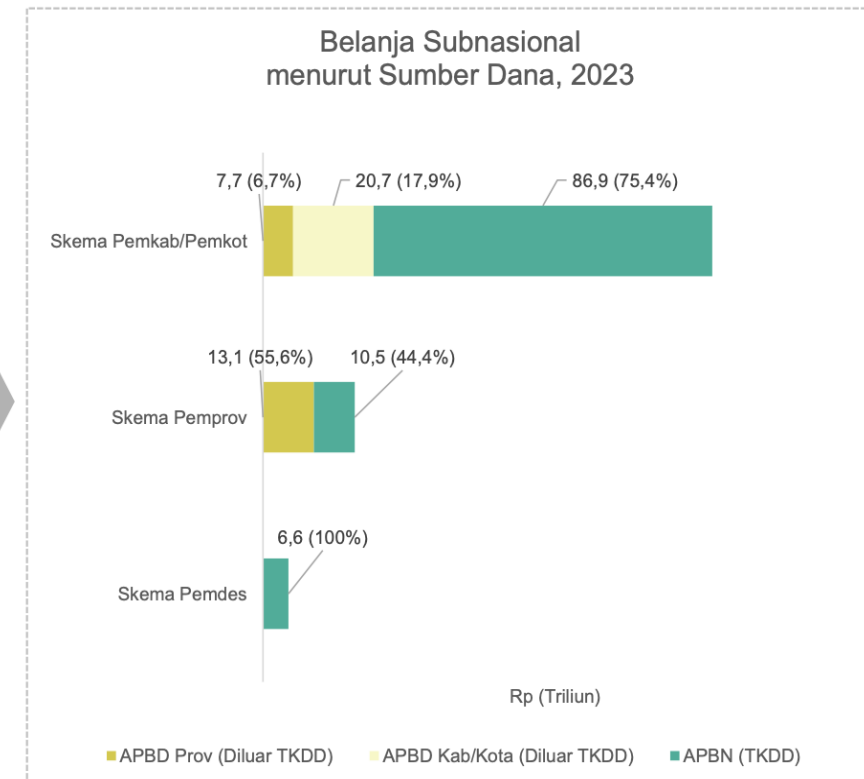
Pendanaan Kesehatan di Daerah

Skema Publik

Belanja kesehatan pemerintah thd total

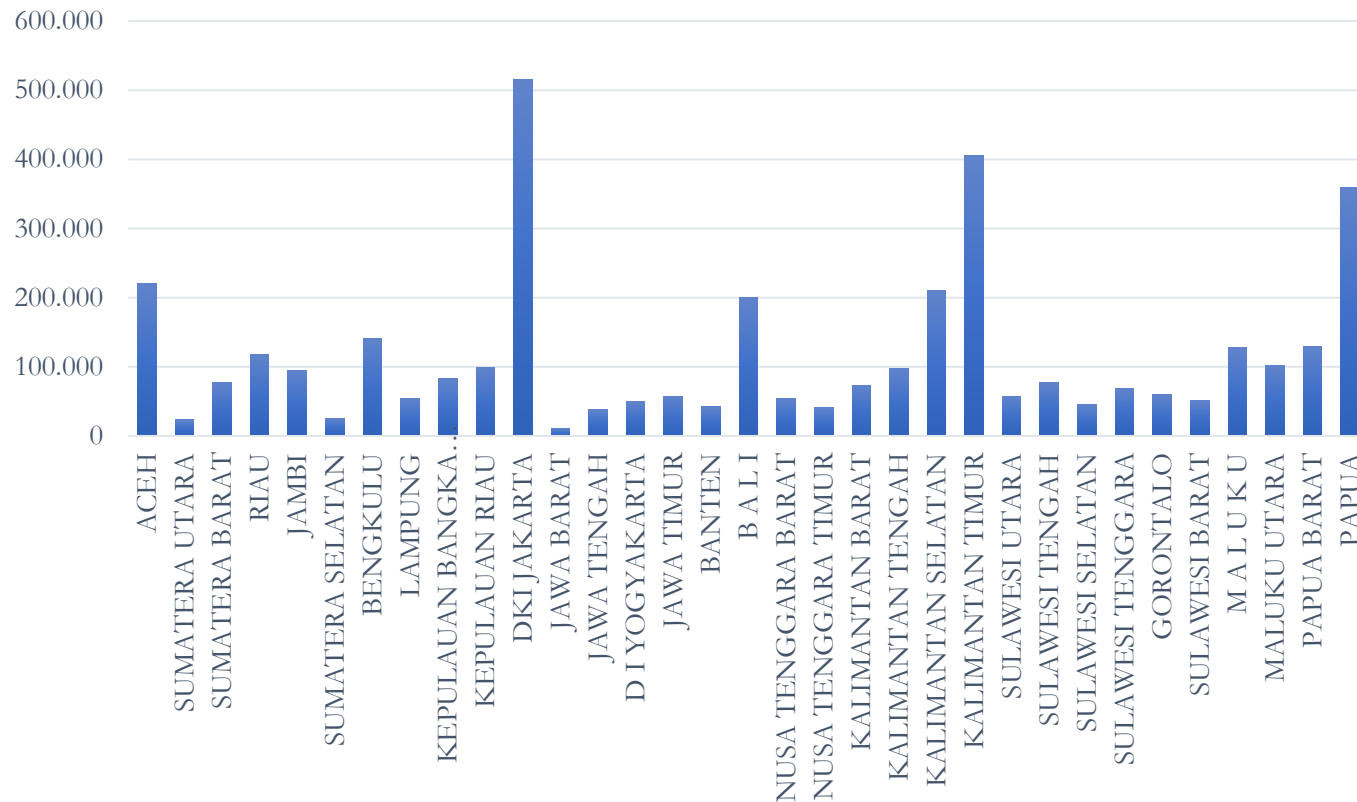


Proporsi sumber dana pada skema



Sumber: Kemenkes, 2024

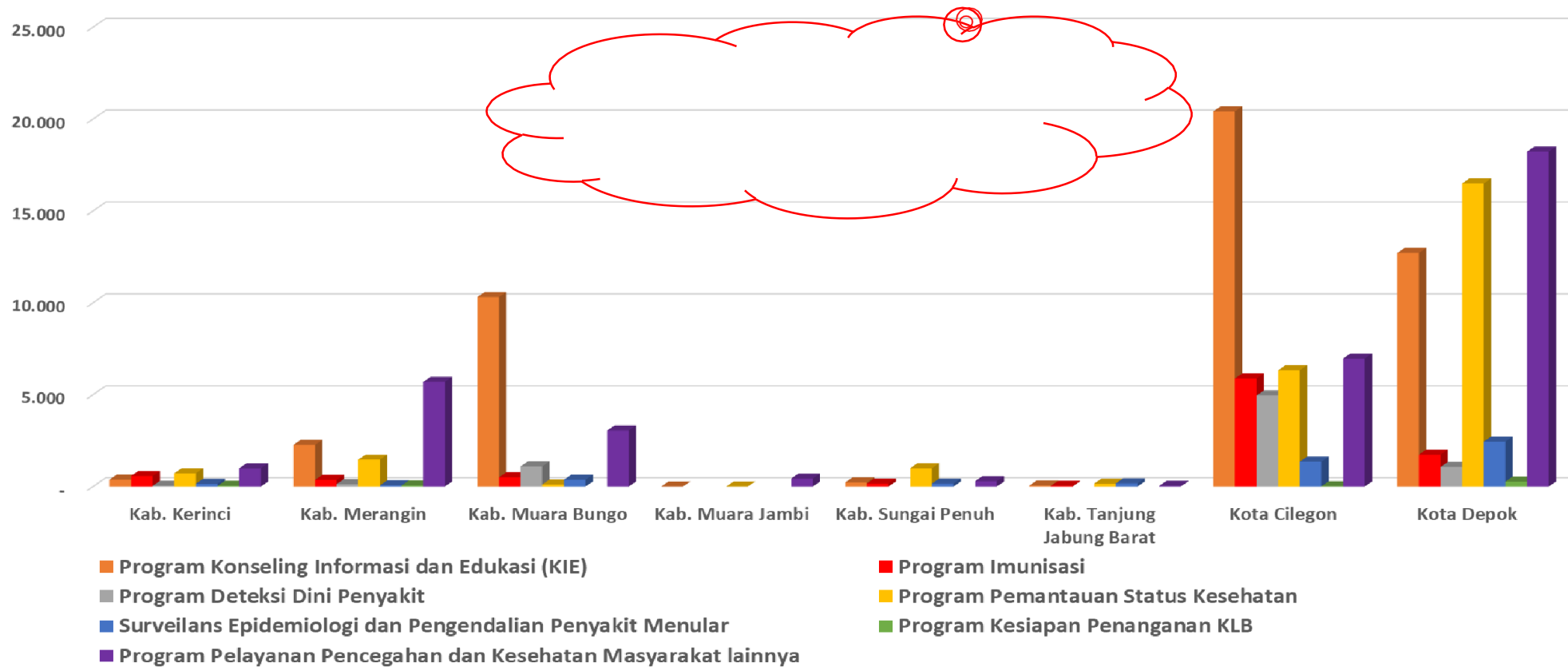
Kesenjangan (Lanjutan)



Begitu juga dengan anggaran kesehatan penduduk yang mayoritas < Rp200 ribu per penduduk

Belanja Fungsi Promotif dan Preventif di 9 Daerah – DHA

Disparitas Belanja Promotif Preventif sangat berbeda antar Kabupaten/Kota



Sumber Dana – Masyarakat - FILANTROPI

Sumber Dana Filantropi



UNIVERSITAS GADJAH MADA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pasal 1 ayat 9 →
Filantropi

Pelaku Filantropi

1. *High-net-worth individual (HNWI)*
→ A
2. *Retail* → B

1. Korporasi
2. Non-korporasi
 - Lembaga yang dibentuk oleh korporasi
 - Lembaga keluarga
 - Lembaga keagamaan
 - Lembaga independen

Viergever and Hendriks *Health Research Policy and Systems* (2016) 14:12
DOI 10.1186/s12961-015-0074-z

Health Research Policy
and Systems

RESEARCH

Open Access



The 10 largest public and philanthropic funders of health research in the world: what they fund and how they distribute their funds

Roderik F. Viergever^{1*} and Thom C. C. Hendriks²

Abstract

Background: Little is known about who the main public and philanthropic funders of health research are globally, what they fund and how they decide what gets funded. This study aims to identify the 10 largest public and philanthropic health research funding organizations in the world, to report on what they fund, and on how they distribute their funds.

Methods: The world's key health research funding organizations were identified through a search strategy aimed at identifying different types of funding organizations. Organizations were ranked by their reported total annual health research expenditures. For the 10 largest funding organizations, data were collected on (1) funding amounts allocated towards 20 health areas, and (2) schemes employed for distributing funding (intramural/extramural, project/people/organizational and targeted/untargeted funding). Data collection consisted of a review of reports and websites and interviews with representatives of funding organizations. Data collection was challenging; data were often not reported or reported using different classification systems.

Results: Overall, 55 key health research funding organizations were identified. The 10 largest funding organizations together funded research for \$37.1 billion, constituting 40% of all public and philanthropic health research spending globally. The largest funder was the United States National Institutes of Health (\$26.1 billion), followed by European Commission (\$3.7 billion), and the United Kingdom Medical Research Council (\$1.3 billion). The largest philanthropic funder was the Wellcome Trust (\$909.1 million), the largest funder of health research through development assistance was USAID (\$186.4 million), and the largest multilateral funder was the World Health Organization (\$135.0 million). Funding distribution mechanisms and funding patterns varied substantially between the 10 largest funders.

Conclusions: There is a need for increased transparency about who the main funders of health research globally, what they fund and how they decide on what gets funded, and for improving the evidence base for our funding models. Data on organizations' funding patterns and funding distribution mechanisms are often available, and when they are, they are reported using different classification systems. To start increasing transparency in health research funding, we have established www.healthresearchfunders.org that lists health research funding organizations worldwide and their health research expenditures.

words: Globalization, Health funding, Health policy, Health research, Priority setting, Research and development (R&D), Research funding, Research governance, Research grants, Research policy



Sumber Dana Luar Negeri

Indonesia Outcome and Output Listing 2025

OUTCOMES / OUTPUTS	SP GOALS	SDGS	ALLOCATIONS	EXPENSE(S)
> OUTCOME 7: PROGRAMME EFFECTIVENESS			\$ 7M	\$ 3M
> OPERATIONAL EFFECTIVENESS			\$ 0k	\$ -1k
> OUTCOME 6: SOCIAL POLICY			\$ 2M	\$ 602k
> OUTCOME 5:			\$ 3M	\$ 691k
			\$ 9M	\$ 1M

 > OUTCOME 1 CHILD
SURVIVAL AND
DEVELOPMENT

\$ 72k

\$ 0k

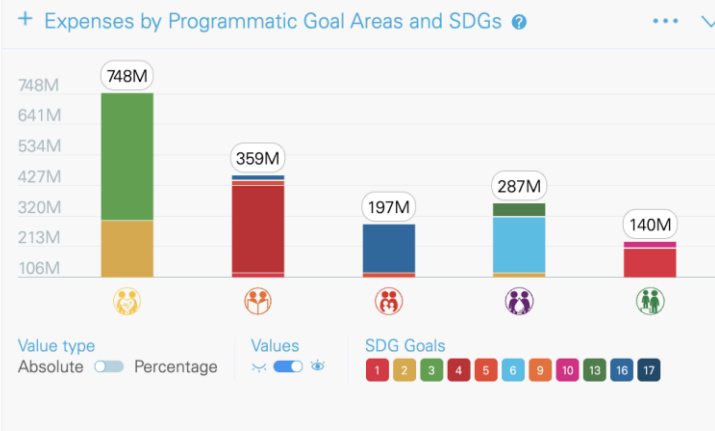
 OUTPUT 1.7
EMERGENCIES

 OUTPUT 1.5
EPI/MALARIA/HIV

 OUTPUT 1.4
Maternal, Neonatal,
and Child Health
(MNCH)

 OUTPUT 1.1
NUTRITION

What is the money contributing to?



> OUTCOME 3: HEALTH			\$ 9M	\$ 2M
> OUTCOME 2: WASH			\$ 2M	\$ 576k
> OUTCOME 1: NUTRITION			\$ 8M	\$ 1M
> PROGRAMME EFFECTIVENESS OUTCOME			\$ 0k	\$ 18k
> OUTCOME 3 CHILD PROTECTION			\$ 0k	\$ 0k
> OUTCOME 2 EDU EARLY CHLD & ADOLESC DEVEL			\$ 3k	\$ 0k
> OUTCOME 1 CHILD			\$ 72k	\$ 0k

Pendanaan dan Dukungan: UNICEF berkontribusi dalam perencanaan strategis dan implementasi kebijakan kesehatan pemerintah Indonesia, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Fokus utamanya adalah pada kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses layanan kesehatan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

[UNICEF](https://www.unicef.org/indonesia)

Anggaran 2025: UNICEF mengalokasikan dana sebesar \$613.338 untuk Outcome 3 (Kesehatan) dan \$4.804.825 untuk Outcome 4 (Pendidikan) di Indonesia.



WHO

Kerja sama ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dijabarkan di dalam Rencana Kerja **Bersama Kementerian Kesehatan (*Joint Work Plan*) dan WHO** Indonesia untuk WHO Programme Budget 2024–2025. WHO Indonesia akan menyediakan pendanaan untuk implementasi kegiatan-kegiatan bienium 2024–2025 berdasarkan perjanjian hibah sebesar **USD 14,003,191**.

(Badan Kebijakan Kemenkes-
<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/kementerian-kesehatan-dan-who-sepakati-perjanjian-hibah>)

UNFPA

UNFPA (Dana Kependudukan PBB)

Pendanaan pada tahun 2024, UNFPA menerima kontribusi sebesar \$295 juta dari berbagai mitra untuk mendukung upaya kemanusiaan, termasuk di Indonesia.

Fokus Program: UNFPA memulai fase keempat (2024–2028) dari Dana Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, yang berfokus pada 44 negara dengan beban tinggi, termasuk Indonesia. Program ini mencakup pelatihan bidan dan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak



- USAID
- The Global Fund
- Bank Dunia
- Bill & Melinda Gates Foundation
- Dan lainnya



Penutup

- Distribusi anggaran kesehatan
- Dana Pemerintah Pusat di daerah dan dana Pemerintah Daerah
 - Dana Alokasi Khusus Fisik
 - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - Dana lain
- Dana swasta menjadi sumber alternatif untuk ikut serta mendanai program – program kesehatan
- Penyerapan anggaran di akhir tahun.
- Sistem digitalisasi dari perencanaan sampai pelaporan

“Knowledge is power, insight is key”



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

ugm.ac.id